

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada tiga Penelitian terdahulu yang ditinjau oleh peneliti. Adapun judul dari masing-masing Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akuaponik sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Labuhbaru Barat dalam Konsep Urban Farming oleh Naila Fauza, Ade Alwi, dkk dari Universitas Riau pada tahun 2021
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Ternak Ngudi Mulyo Panggang oleh PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu oleh Muhammad Nasib, Shindy Karenina, dkk dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2020
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Kelompok Usaha Tani di Desa Ped oleh I.W. Surata dan T.G.T. Nindhia dari Universitas Udayana Bali pada tahun 2016.

Ketiga Penelitian tersebut peneliti tinjau karena relevan dengan apa yang akan peneliti lakukan, terutama pada konsep pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani dan program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan. Ketiga Penelitian tersebut juga memiliki keragaman dan perbedaan masing-masing, dan juga perbedaan pada Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari ketiga Penelitian terdahulu tersebut, secara lebih jelas berikut ada tabel yang mendeskripsikan Penelitian terdahulu yang dilakukan:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	METODE	HASIL	PERBEDAAN	KEBARUAN PENELITIAN
1	Naila Fauza, Ade Alwi, Anna Pratiwi, dkk - Universitas Riau. 2021. Akuaponik sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat Labuhbaru Barat dalam Konsep Urban Farming. Jurnal Pengabdian Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Technology Development (PTD) Dan Pendekatan Edukatif</i> • Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara Item • Populasi dan Sampelnya adalah Masyarakat RT.003, RW. 006 Desa Kabasaran Labuhbaru Barat. • Analisis Data menggunakan <i>Thematic & Narrative Analysis</i> 	Masyarakat mendapatkan peningkatan pengetahuan dan informasi tambahan mengenai pengembangan kemampuan masyarakat dalam pembudidayaan akuaponik sebagai upaya melakukan usaha di masa pandemi	<p>Pada Penelitian pertama ada perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya berfokus pada pengembangan metode akuaponik, sedangkan peneliti melakukan pemberdayaan lewat peternakan dan sayuran Organikk dengan metode akuaponik; 2. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan edukatif, sedangkan peneliti melakukan dengan pendekatan Penelitian tindakan partisipasi (<i>Participatory Action Research</i>) 3. Dilakukan dengan pendekatan edukatif yang memberikan penekanan pada aspek peningkatan pengetahuan dan informasi, sedangkan peneliti selain lewat peningkatan pengetahuan dan informasi juga ada proses pendampingan di dalamnya. 	<p>Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tentang pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan kelompok usaha tani serta implementasi program CSR perusahaan pada program pemberdayaan masyarakat, maka kebaruan atau <i>Novelty</i> dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran atau objek dari penelitian yang mengintegrasikan antara kelompok usaha ternak dan sayur dalam kelompok usaha tani. 2. Proses pemberdayaan yang dilakukan yang berdasarkan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis aset yang dilengkapi dengan pendekatan aspek-aspek <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> dan langkah-langkah pemberdayaan berbasis aset 7D. 3. Penggunaan metode penelitian tindakan partisipatori (PAR) dimana peneliti berpartisipasi dalam pemberdayaan.
2	Muhammad Nasib, Shindy Karenina, Alif Laela, dkk – UIN Sunan Kalijaga. 2020. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Ternak Ngudi Mulyo Panggang oleh PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. EMPOWER: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kualitatif dengan Pendekatan Kepustakaan • Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Kepustakaan dan Wawancara • Pouplasi dan Sampelnya adalah berdasarkan Laporan Implementasi CSR PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu dan Kelompok Ternak Ngudi Mulyo • Analisis Data menggunakan <i>Data Collection, Data Condensation, Display Data, Narrative Analysis, dan Conclusion</i> 	Memberikan informasi mengenai implementasi program CSR yang dilaksanakan pada kelompok ternak Ngudi Mulyo mulai dari tahap perencanaan program sampai Evaluasi	<p>Pada Penelitian kedua, ada perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya berfokus pada aspek-aspek peternakan, sedangkan peneliti melakukan pemberdayaan lewat integrasi antara peternakan dan sayuran Organikk dengan metode akuaponik; 2. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kepustakaan yang berasal dari hasil studi pustaka, sedangkan peneliti menggunakan metode Penelitian tindakan partisipasi dengan ikut langsung dalam program pemberdayaan dari awal hingga akhir.. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran atau objek dari penelitian yang mengintegrasikan antara kelompok usaha ternak dan sayur dalam kelompok usaha tani. 2. Proses pemberdayaan yang dilakukan yang berdasarkan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis aset yang dilengkapi dengan pendekatan aspek-aspek <i>Asset Based Community Development (ABCD)</i> dan langkah-langkah pemberdayaan berbasis aset 7D. 3. Penggunaan metode penelitian tindakan partisipatori (PAR) dimana peneliti berpartisipasi dalam pemberdayaan.

3	<p>I W Surata dan T G T Nindhia – Universitas Udayana Bali. 2016.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Kelompok Usaha Tani di Desa Ped. Jurnal Udayana Mengabdi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif model entrepreneurship capacity building, participatory technology development dan evaluasi program Pembangunan • Teknik Pengumpulan Data menggunakan Survey, Observasi, dan Wawancara. • Populasi dan Sampelnya adalah Kelompok Tani di Desa Ped, Nusa Penida Bali. • Analisis Data menggunakan <i>Data Condensation</i>, <i>Display Data</i> dan <i>Conclusion</i> dan Analisa Deskriptif 	<p>Memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok tani lewat kegiatan-kegiatan Ternak Babi, Pembibitan, Biogas, Fermentasi Batang Pisang, dan pengeringan rumput laut.</p>	<p>Pada Penelitian ketiga, ada perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Penelitian ini sasarannya adalah pemberdayaan kelompok usaha tani, perbedaannya dengan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah objek pemberdayaannya, dimana dalam Penelitian ini menggunakan sasaran peternakan pada peternakan babi, dan pada aspek pertaniannya menggunakan metode <i>bio gass</i> sedangkan sasaran pemberdayaan yang dilakukan oleh peneliti pada aspek peternakan adalah domba dan sapi, dan pada aspek pertaniannya menggunakan metode pertanian akuaponik. 	
---	--	--	--	---	--

Sumber: Olah Data Penelitian 2023

Pada penelitian pertama, metode akuaponik dijadikan sebagai sarana dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Labuhbaru Barat. Penelitian yang dipublikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat ini sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada pendekatan edukatif, sehingga dalam hasilnya dapat dilihat bahwa ada penekanan pada aspek-aspek peningkatan pengetahuan dan informasi tambahan kepada masyarakat tentang bagaimana cara-cara melakukan kegiatan perkebunan melalui metode akuaponik.

Pada penelitian kedua, fokusnya masih sama tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat namun sedikit bergeser ke arah peternakan, dimana kelompok ternak binaan milik PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu menjadi objek dari penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan edukatif, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kepustakaan, sehingga hasil dari penelitian yang nampak disini berasal dari studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti terhadap rangkaian program pemberdayaan mulai dari tahapan perencanaan sampai evaluasi program yang dilakukan pada program pemberdayaan masyarakat kelompok ternak Ngudi Mulyo.

Pada penelitian ketiga, memiliki fokus pada pengembangan kelompok usaha tani yang berada di daerah Bali, utamanya di Desa Ped. Penelitian yang dipublikasi oleh Jurnal Udayana Mengabdi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek dari penelitiannya pun hanya satu, yakni kelompok usaha tani Desa Ped, Nusa Penida, Bali. Menggunakan pendekatan deskriptif penelitian ini memberikan gambaran informasi tentang kegiatan-kegiatan

pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha tani Desa Ped lewat kegiatan-kegiatan ternak babi, pembibitan biogas, fermentasi batang pisang dan pengeringan rumput laut.

Masing-masing penelitian tersebut juga memiliki kekurangannya masing-masing, seperti pada penelitian pertama, tidak dilakukannya pemetaan potensi baik sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga di akhir penelitian peneliti menuliskan bahwa kegiatan akuaponik ini mesti terus dimonitor karena ditakutkan ada tahapan yang terlewat atau tidak dipahami oleh masyarakat yang memang pada dasarnya baru memulai belajar metode akuaponik

Berdasarkan matrik di atas tersebut juga maka kebaruan atau *novelty* dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sasaran dari pemberdayaan yang dilakukan pada kelompok usaha tani dengan mengintegrasikan peternakan dan sayuran organik metode akuaponik. Selain itu, pada proses pemberdayaan yang peneliti lakukan tidak hanya fokus terhadap peningkatan pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga melakukan proses pendampingan atau fasilitasi kelompok mulai dari pelaksanaan produksi hingga pemasaran hasil produksi. Peningkatan pada pengetahuan dan informasi yang diberikan kepada kelompok tidak hanya tentang proses peternakan dan sayuran organik metode akuaponik saja, melainkan hingga peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan dalam manajemen pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, maka Penelitian tentang, “*Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani Melalui Program Corporate Social Responsibility di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang*” diharapkan dapat menjadi pembaharuan terhadap Penelitian-Penelitian terdahulu. Penelitian ini selain menggunakan tinjauan penelitian terdahulu juga berdasar pada konsep dan teori yang ada sebagai *baseline* dan pedoman dalam proses pelaksanaan Penelitian.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan atau membangun kemampuan dari sebuah masyarakat yang dilakukan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensinya dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki itu menjadi sebuah tindakan nyata untuk perubahan yang lebih baik (Zubaedi, 2007).

Mardikanto (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat terutama yang rentan agar mampu dan berani bersuara (*voice*) dan memiliki keberanian untuk memilih (*choice*) cara-cara untuk memperbaiki kehidupannya.

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dalam meningkatkan skala dari apa yang diberdayakan. Objek atau apa yang diberdayakan ini juga merupakan orang-orang atau kelompok yang memiliki keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dari berbagai aspek, sehingga perlu upaya peningkatan kesetaraan serta mengurangi kesenjangan dengan merevitalisasi dan mengoptimalkan utilitas melalui peningkatan nilai-nilai yang ada.

Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan, dan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pemberdayaan di sini juga dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin) untuk mau berpartisipasi, negosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung jawab (*accountable*) untuk perbaikan kehidupannya. Proses memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang memiliki ketidakmampuan melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Mardikanto, 2009).

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memaksimalkan daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mengalami kesenjangan untuk memenuhi kebutuhannya lewat cara-cara yang terencana dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas pula, dapat diketahui salah satu upaya pemecahan masalah terkait dengan kesenjangan perekonomian dan ketidakmampuan masyarakat Desa Sindangsari memaksimalkan potensinya dapat dipecahkan lewat upaya pemberdayaan masyarakat.

2.2.1.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hutomo (2000) menjelaskan pengelompokan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yakni: (1) Pemberian bantuan modal, yakni dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak memiliki modal sehingga mereka tidak mampu berbuat untuk dirinya bahkan untuk lingkungannya; (2) Pemberian bantuan infrastruktur, hal ini berkaitan dengan mendorong masyarakat agar berdaya dan membantu memudahkan akses aktivitas dalam pemberdayaannya; (3) Bantuan pendampingan, dengan memfasilitasi proses pembelajaran atau refleksi dan menjadi penghubung untuk masyarakat yang memiliki ketidaksamaan dalam segi pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan dengan penerima bantuan; (4) Proses penguatan forum-forum kelembagaan, adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memudahkannya untuk mengakses forum-forum kelembagaan seperti permodalan, media musyawarah masyarakat, dll; dan diakhiri dengan (5) Penguatan kemitraan, lewat penguatan bersama baik dari sektor kecil, menengah dan besar sehingga saling melengkapi satu sama lainnya (Slamet, 2003).

Pemberdayaan masyarakat dilihat dari kegiatan-kegiatannya tersebut merupakan upaya untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yang diiringi dengan peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan keterampilannya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya yang potensial, dan dalam prosesnya pemberdayaan juga tidak bisa dilepaskan dari aspek kelembagaan.

2.2.1.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan membentuk kemandirian masyarakat. Kemandirian disini baik kemandirian dalam berpikir, bertindak dan pengendalian apa yang dilakukan. Pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuannya perlu juga dukungan kemampuan baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang mampu mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat. (Sulistiyani, 2004).

Tujuan pemberdayaan lainnya juga sempat dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2019), yang mengemukakan bahwa ada beragam upaya perbaikan sebagai tujuan dari dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat, mulai dari perbaikan secara utuh, Pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan serta masyarakat.

Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat bentuknya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masyarakat lewat upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan Penelitian yang dilakukan, yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Sindangsari dengan upaya-upaya perbaikan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan aksesibilitas masyarakat dalam kelompok usaha tani pada program *Corporate Social Responsibility* PT Cikarang Listrindo Tbk.

2.2.1.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang terencana, dimana dalam pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan yang sistematis guna mencapai tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Sejalan dengan itu, Wrihatnolo dan Dwidjwijoto dalam Anggraini dkk (2019) menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Tahapan Penyadaran

Pada tahapan ini diberikan pemahaman dan memicu kesadaran terkait hak-hak untuk menjadi mampu dan memotivasi objek yang diberdayakan agar keluar dari ketidakmampuan dan ketidakberdayaanya, tahapan ini dapat dilakukan dengan kegiatan pendampingan.

2. Tahapan Pengkapasitasan

Tahapan ini berfokus pada memampukan masyarakat lewat peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar mampu melihat dan mengambil peluang dan potensi yang ada guna meningkatkan *life skill*.

3. Tahapan Pendayagunaan

Tahapan terakhir ini dilakukan dengan memberikan peluang kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan sumber yang ada melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan dengan memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat sesuai kapasitas, kapabilitas, dan akomodasi aspirasi dan dipandu untuk mengevaluasi diri sendiri terhadap pelaksanaan yang dilakukan sebelumnya.

Sejalan dengan tahapan yang diungkapkan di atas, Sulistiyani (2004), juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui itu meliputi tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, tahapan transformasi pengetahuan dan kemampuan, dan terakhir tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan yang tujuannya adalah membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif agar tercapai kemandirian.

Tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ada tiga tahapan penting yang mesti dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni pertama adalah tahapan penyadaran, tahapan peningkatan baik pengetahuan dan keterampilan dan tahapan terakhir, yakni pendayagunaan yang mendukung kemandirian. Tahapan-tahapan tersebut juga dirasa relevan dengan penelitian yang dilakukan dimana pada kondisi masyarakat Desa Sindangsari hal pertama yang paling pokok adalah menyadarkan bahwa ada potensi yang belum dimaksimalkan oleh masyarakat Desa Sindangsari.

2.2.1.5 Model Pemberdayaan Masyarakat

Ada banyak model pemberdayaan masyarakat, tetapi model pemberdayaan masyarakat menurut Dhamotaran (2009) lewat pendekatan 7D mungkin yang paling lengkap menjelaskan tahapannya. Pendekatan 7D berisikan langkah-langkah dalam memulai sebuah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan 7D ini dimulai dengan memberikan apresiasi dan perhatian terhadap potensi dan prestasi masyarakat yang memiliki nilai-nilai murni yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah mendorong kesadaran masyarakat tentang ketersediaan sumber daya yang dimiliki untuk kemudian dianalisis kekuatan dan kelemahan dari masyarakat.

Pendekatan 7D ini memiliki tahapan yang sistematis yang dimulai dari *developing relation* hingga di akhir *documenting outputs, outcomes and learning* sebagai berikut:

1. D1: *Developing relations*

Pada tahapan mengembangkan hubungan ini diperlukan pengetahuan tentang suatu hubungan di masyarakat yang saling mengenal, saling percaya dan saling menghargai antar masing-masing anggota kelompok masyarakat, pun dengan pihak di luar masyarakat seperti pejabat pemerintahan, fasilitator dan mediator hingga pihak swasta.

2. D2: *Discovering capacities*

Pada tahapan ini masyarakat perlu mencoba menyadari potensi dan sumber-sumber yang mereka miliki, termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan masalah dan kerentanan yang dihadapi.

3. *D3: Dreaming of community future*

Pada tahapan ini masyarakat diarahkan dan didorong untuk menyatakan harapan dan cita-cita dari kelompoknya. Cita-cita ini berupa gambaran kreatif tentang harapan terhadap dirinya di masa yang akan datang secara positif untuk kemudian dikembangkan menjadi visi yang dapat membangun komitmen dan memotivasi masyarakat untuk bergerak.

4. *D4: Directions of community actions*

Pada tahapan ini masyarakat menetapkan tujuan kelompoknya secara jelas terutama untuk merumuskan kegiatan-kegiatannya.

5. *D5: Designing community actions*

Pada tahapan ini masyarakat secara bersama-sama merancang langkah-langkah dengan menerjemahkan visi, tujuan, dan kegiatannya dalam satu rencana kerja dan struktur yang jelas.

6. *D6: Delivering planned activities*

Pada tahapan ini masyarakat mengeksekusi rencana kerja yang telah disusun untuk mencapai tujuannya.

7. *D7: Documenting outputs, outcomes and learning*

Pada tahapan terakhir, masyarakat merefleksikan proses perjalanan dan hasil yang telah mereka capai. Refleksi dilakukan secara holistik dengan melibatkan pihak luar dan dokumentasi disini merujuk pada evaluasi terhadap aksi dan rencana kerja untuk menilai seberapa berhasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sejalan dengan tujuan yang telah disusun. (Dhamotaran, 2009).

Model lainnya dalam pendekatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Pendekatan ABCD sendiri merupakan model pemberdayaan masyarakat yang memiliki inti pada pemanfaatan aset dan potensi yang ada di masyarakat (Maulana, 2019). Dalam pendekatan ini, masyarakat merupakan aset penting bagi sebuah lokasi.

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini adalah alternatif dari pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekannya. Adapun aset disini adalah potensi yang ada dan dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Fitriawan, 2020). Aset-aset tersebut kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lokasi pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan model ABCD secara garis besar memiliki 4 aspek pemberdayaan yang perlu diperhatikan, yakni *Problem Based Approach*, *Need Based Approach*, *Right Based Approach*, dan *Asset Based Approach* (Widjajanti, 2011). Adapun masing-masing penjelasan aspek pemberdayaan masyarakat berdasarkan model ABCD adalah sebagai berikut:

1. *Problem Based Approach*

Potensi yang melihat pada pendekatan masalah, dimana dengan adanya masalah pada tiap orang atau masyarakat membuat seseorang sadar tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat sebuah perubahan atau setidaknya berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

2. *Need Based Approach*

Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan tak terkecuali dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal, sandang, pangan dan papan adalah hal yang perlu dipenuhi dalam masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Indikator-indikator tersebut yang digunakan untuk memantik masyarakat dalam melakukan perubahan.

3. *Right Based Approach*

Pada aspek ini menggunakan kekayaan untuk pengembangan masyarakat itu sendiri, pemberian modal pada masyarakat guna menunjang kegiatan dalam proses keberdayaan sebuah masyarakat. Aspek ini dapat digunakan atau dapat menutup aspek lainnya.

4. *Asset Based Approach*

Pada aspek ini menekankan pada penggunaan potensi dasar yang dimiliki oleh masyarakat sendiri untuk memecahkan masalah yang ada. Potensi disini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dll. Potensi tersebut melalui kebersamaan, kerukunan, dan solidaritas dalam masyarakat diharapkan akan memunculkan kecerdasan dan kepekaan sosial di masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat mengetahui masalah dan solusinya.

2.2.1.6 Faktor-Faktor Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat

Mengetahui pengertian, tujuan dan tahapan pada proses pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting, begitupun juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ini Mardikanto (2009), menjelaskan setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Faktor disini adalah faktor yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berasal dari luar lingkup kajian pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor yang harus diperhatikan antara lain: aksesibilitas informasi, partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas Organisasi lokal. Penjelasan masing-masing faktor sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi di sini merupakan kebutuhan penting yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena segala informasi berkaitan erat dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi dan akuntabilitas (Mardikanto, 2009).

Pemberdayaan masyarakat erat dengan penjangkauan dan pemberian akses informasi bagi masyarakat, lembaga, dan Organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya dalam peningkatan taraf kehidupan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat harus mengatasi ketidakmampuan masyarakat dalam menjangkau akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan adanya ketidakinginan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang ada pada para pihak kepada masyarakat (Mardikanto, 2009).

2. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan aktif dan mendalam dari masyarakat baik pada tingkatan pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan, pelaksanaan program dan pembagian yang rata, dan pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program (Mardikanto, 2009).

Partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat juga memiliki beberapa bentuk seperti yang dikemukakan Yadav dalam Mardikanto (2009), bahwa ada empat bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan masyarakat, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Dari penjelasan partisipasi barusan peneliti mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Penelitian dan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan ikut terjun secara langsung dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam tiap tahapan-tahapan program pemberdayaan

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan semua potensi masyarakat yang ada. Akuntabilitas disini berkaitan dengan pertanggungjawaban publik atas segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan atas nama rakyat (Mardikanto, 2009).

Dalam hal ini, akuntabilitas dalam program pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai usaha untuk mengendalikan kelompok karena kontribusi individu tidak dapat teridentifikasi. Pelibatan banyak pihak untuk memanfaatkan potensi masyarakat menjadi poin dalam faktor pemberdayaan masyarakat ini (Robbins, 2002).

4. Kapasitas Organisasi Lokal

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas Organisasi lokal dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan bekerjasama, mengOrganisasi warga masyarakat, serta memobilisasi sumber daya untuk pemecahan masalah yang ada (Mardikanto, 2009).

Ragam bentuk kapasitas Organisasi lokal mesti disesuaikan dengan kebutuhan pemberdayaan. Pengembangan kapasitas manusia yang bisa menjadi saluran dari peningkatan kapasitas Organisasi lokal dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, peningkatan skill, hingga peningkatan akses. (Soetomo, 2009).

Berdasarkan faktor-faktor yang dijelaskan di atas, dirasa perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lewat kelompok usaha tani di Desa Sindangsari, karena hal-hal tersebut merupakan titik perubahan yang mesti dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Kelompok Usaha Tani

2.2.2.1 Pengertian Kelompok Usaha Tani

Kelompok menurut Zastrow dalam Garvin (1997) adalah sebuah pluralitas antar individu-individu yang di dalamnya saling melakukan kontak dengan satu sama lainnya yang dalam interaksinya saling memperhatikan dan saling menyadari akan adanya beberapa kesamaan yang penting.

Kelompok Tani menurut Putra (2016), adalah sebuah perkumpulan dimana di dalamnya para anggota saling memiliki kepentingan dan tujuan yang sama atas dasar kemauan bersama untuk meningkatkan kinerja pertanian. Kelompok Usaha Tani yang juga merupakan sebutan lainnya dari kelompok tani juga didasarkan pada pendekatan geografis lahan yang saling berdekatan, pendekatan wilayah tempat tinggal, pendekatan profesi dan komoditas yang dikelola menjadi alasan adanya kelompok usaha tani.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok tani adalah mereka yang terdiri dari beberapa individu-individu yang terbentuk atas beberapa dasar kesamaan baik secara geografis dan profesi serta tujuan yang sama untuk meningkatkan usahanya. Melihat profesi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sindangsari yang rerata berprofesi sebagai petani, pekebun maupun peternak maka atas dasar itu pula program pemberdayaan ini menasar pada pemberdayaan kelompok usaha tani.

2.2.2.2 Karakteristik Kelompok Usaha Tani

Didasari pada beberapa kesamaan para anggotanya membuat kelompok usaha tani memiliki karakteristik yang khas yang membedakannya dengan kelompok lainnya. Menurut Winardi (2005), ada beberapa karakteristik dari kelompok usaha tani ini mulai dari, adanya interaksi antar anggota yang berlangsung secara kontinyu dalam jangka yang lama, kesadaran antar anggota yang menjadi bagian dari kelompok, adanya kesepakatan bersama terkait norma, nilai, dan tujuan kelompok tani, adanya struktur kelompok yang mengatur hubungan, peranan, tugas, hak dan kewajiban dalam kelompok usaha tani.

Karakteristik atau ciri-ciri kelompok tani ini juga diperkuat dengan aturan yang dikeluarkan lewat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (2016), yang menjabarkan bahwa setidaknya ada tiga karakteristik dari kelompok usaha tani, yakni:

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya antar anggota
2. Mempunyai kepentingan, tujuan dan pandangan yang sama dalam usaha tani
3. Memiliki kesamaan tradisi, pemukiman, hamparan, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya, adat istiadat, bahasa dan ekologi.

Berdasarkan penjelasan karakteristik tersebut mempertegas bahwa ada suatu kesamaan dalam banyak hal yang mendasari terbentuknya kelompok usaha tani. Dalam kasus masyarakat Desa Sindangsari, profesi, pemukiman, jenis usaha dan keakraban yang terjalin di dalamnya menjadi karakteristik yang nampak dalam masyarakat Desa Sindangsari.

2.2.2.3 Fungsi Kelompok Usaha Tani

Kelompok usaha tani sendiri berfungsi sebagai wadah belajar bagi para anggotanya. Wadah belajar ini bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kemandirian tani sehingga ada peningkatan produktivitas dalam usaha sektor pertanian (Pamertan, 2015).

Selain hal-hal tersebut, menurut Muthmainah (2014), Kelompok usaha tani sendiri berfungsi sebagai arena untuk kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil tani sehingga menjadi petani yang mandiri.

Fungsi-fungsi yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan memiliki kesinambungan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama pada bagian sebagai wadah peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta mewujudkan kemandirian yang pada saat ini menjadi salah satu indikasi masalah dalam kesenjangan perekonomian pada masyarakat Desa Sindangsari.

2.2.2.4 Manfaat Kelompok Usaha Tani

Kelompok usaha tani sendiri memiliki dampak positif tidak hanya bagi anggota kelompok yang ada di dalamnya, berdasarkan uraian Suhardiyono (2002), setidaknya ada beberapa manfaat sosial yang dapat dirasakan dari adanya kelompok usaha tani. Manfaat sosial tersebut adalah:

1. Model Pendidikan bagi masyarakat pedesaan yang berbasis kemasyarakatann
2. Menghidupkan kembali jiwa ekonomi kerakyatan lewat sentra ekonomi pertanian milik masyarakat

3. Tumbuhnya semangat gotong royong yang merupakan hasil positif dari perasaan memiliki para anggota kelompok usaha tani

Manfaat-manfaat di atas juga sejalan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya. Melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sindangsari tidak menutup kemungkinan ada manfaat lainnya seperti tumbuh kembangnya perekonomian yang lebih variatif dan sumber penghasilan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Corporate Social Responsibility

2.2.3.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility atau dapat disingkat sebagai CSR berdasarkan standar internasional ISO 26000 dalam Suharto (2020), adalah bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan atas dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan yang dilakukan pada masyarakat dan lingkungan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pertimbangan harapan para pihak, sejalan dengan hukum yang berlaku; serta terintegrasi dengan Organisasi secara menyeluruh.

Johnson dan Johnson dalam Hadi (2011), juga menyatakan hal serupa yang pada dasarnya mengatakan bahwa CSR berangkat dari asas filosofis tentang bagaimana cara mengelola perusahaan, baik secara separuh maupun secara keseluruhan yang memiliki dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen sebuah perusahaan dalam bertindak secara etis dan bagaimana perusahaan memiliki kontribusi peningkatan ekonomi dan sosial kepada para pihak-pihak yang terlibat dengan tidak lupa memperhatikan aspek lingkungan sekitar perusahaan dengan baik dalam mendukung Pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.3.2 Prinsip Aktivitas *Corporate Social Responsibility*

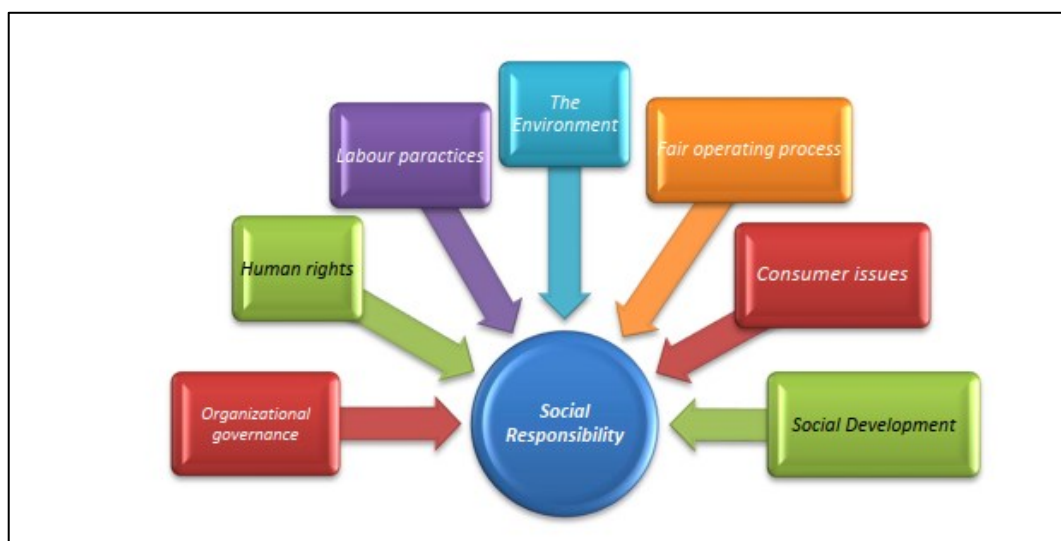
Cakupan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan memiliki dimensi yang cukup kompleks, selain itu CSR juga memiliki penafsiran yang sangat berbeda terutama jika dihubungkan dengan kepentingan para pihak yang berkaitan. Maka dari itu, perlu adanya prinsip-prinsip yang mendasari proses pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* agar lebih mudah dipahami.

Crowther David (2008) dalam Hadi (2011), membagi dan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan. Setidaknya ada tiga prinsip utama, yakni *Sustainability*, *Accountability*, dan *Transparency*. Penjelasan ketiga prinsip tersebut adalah:

1. *Sustainability* atau Keberlanjutan, prinsip pertama ini dapat dilihat ketika bagaimana sebuah perusahaan dalam melaksanakan proses bisnis mengedepankan aspek keberlanjutan sumber daya untuk masa depan
2. *Accountability* atau Akuntabilitas, menjelaskan tentang bagaimana sebuah perusahaan berupaya bertanggung jawab atas segala kegiatan yang telah dilakukan, dan prinsip ini berkaitan juga dengan bagaimana citra sebuah perusahaan.

3. *Transparency* atau Transparansi, prinsip ini ingin mengatakan tentang betapa pentingnya bagi pihak di luar perusahaan untuk mengetahui informasi tentang proses bisnis perusahaan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, khususnya informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari dampak dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Ketika membicarakan prinsip dalam pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* tentu tidak bisa melupakan standar internasional ISO 26000. Berdasarkan dokumen ISO 26000 setidaknya dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* mencakup tujuh aspek mulai dari Kebijakan dan Etika Bisnis; Kesejahteraan Karyawan; Dimensi Penerapan Pasar; Tanggung Jawab Kebijakan Fiskal; Akuntabilitas; Lingkungan; dan Pengembangan Masyarakat.



Gambar 2.1 Tujuh Aspek CSR ISO 26000

Sumber: Dokumen ISO 26000

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lewat kelompok usaha tani yang dilakukan oleh CSR PT Cikarang Listrindo Tbk sudah memiliki dasar yang kuat dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dilakukan dan aspek pada ISO 26000 yang dijalankan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk.

2.2.3.3 Urgensivitas *Corporate Social Responsibility*

Dewasa ini pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility* marak digalakkan. *Corporate Social Responsibility* menjadi tolak ukur sebuah perusahaan dalam pelaksanaan proses bisnis perusahaan. Melihat kondisi ini setidaknya ada beberapa alasan terkait dengan pentingnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam sebuah bisnis perusahaan.

Wibisino (2007), menyatakan setidaknya 3 (tiga) alasan penting tentang kenapa banyak perusahaan mesti melakukan dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial yang sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, yaitu:

1. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dan oleh karenanya dirasa wajar apabila perusahaan juga mesti memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan pengusaha dan masyarakat seharusnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dan untuk mendapat dukungan dari masyarakat, wajar apabila perusahaan juga mesti berkontribusi aktif pada masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berpengaruh terhadap citra baik perusahaan.

3. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu cara untuk menghindari konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Prioritas ini juga berkaitan dengan citra yang diinginkan oleh perusahaan baik pada lingkungan dan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* saat ini bisa menjadi ukuran untuk menentukan apakah perusahaan itu baik atau tidak. Setidaknya ada beberapa argumen yang menguatkan tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial ini yang dikemukakan oleh Robbins & Coulter (2011), yakni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Argumen Urgensi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Argumen yang Mendukung Pentingnya Tanggung Jawab Sosial	
Ekspektasi Publik	Dengan melaksanakan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> mengarahkan opini publik yang tidak hanya bertujuan pada profit namun juga aspek sosial
Profit Jangka Panjang	Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan cenderung memiliki profit jangka panjang yang lebih pasti.
Citra Publik	Keterlibatan sebuah perusahaan dapat membantu dalam upaya pemecahan masalah sosial yang sulit dan biasanya berbelit.
Pelonggaran Peraturan Pemerintah	Dengan melaksanakan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> secara konsisten dan tepat sasaran diharapkan dapat berkurangnya peraturan pemerintah.
Penyeimbang Tanggung Jawab dan Kekuasaan	Dengan adanya <i>Corporate Social Responsibility</i> terjadi penyeimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab dalam perusahaan.
Kepentingan Pemegang Saham	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> tentu akan meningkatkan harga saham dalam jangka panjang
Penguasaan Sumber Daya	Bisnis mempunyai sumber daya dalam mendukung proyek publik dan proyek yang membutuhkan bantuan.
Pendekatan Pencegahan daripada Perbaikan	Bisnis perusahaan yang semakin kompleks membuat perusahaan juga harus mengatasi masalah sosial lebih awal sebelum menjadi masalah lebih serius dan tentu lebih mahal untuk diperbaiki.

Sumber: Robbins, Stephen R & Mary Coultern. 2011.

Berdasarkan dua penjelasan di atas mengenai pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya sebuah program tanggung jawab sosial tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan citra baik perusahaan, tetapi juga menjawab permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Kepentingan perusahaan disini juga berkaitan erat dengan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial seperti menarik calon investor dan proses bisnis jangka panjang, mencegah risiko permasalahan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik dalam hal ini masyarakat pada proses bisnis perusahaan.

2.2.4 Pekerjaan Sosial Industri

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial Industri

Pekerjaan Sosial Industri adalah salah satu percabangan dari ilmu Pekerjaan Sosial, dimana fokusnya adalah pada bagaimana seorang pekerja sosial berperan dalam *setting* industri atau dunia kerja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Straussner (1989) dalam Suharto (2009), yakni bahwa pekerja sosial industri didefinisikan sebagai lapangan praktik para pekerja sosial yang khusus menangani kebutuhan manusia dan sosial dalam dunia kerja, termasuk di dalamnya juga pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memerlukan peranan para pekerja sosial di dalamnya, hal ini melihat peran dari para pekerja sosial sendiri yang memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan, peran, dan keterampilan yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya lewat kegiatan *Corporate Social Responsibility*.

Dari definisi barusan dapat diketahui bahwa pekerja sosial memiliki relevansi terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebuah perusahaan, dimana para pekerja sosial memiliki peranan-peranan khusus yang dapat membantu pelaksanaan proses bisnis perusahaan.

2.2.4.2 Peran Pekerja Sosial Industri

Menurut Straussner (1989) dalam Suharto (2009), menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa peranan model yang dilakukan oleh para pekerja sosial industri diantaranya adalah model pelayanan sosial bagi pegawai, bagi Organisasi perusahaan, bagi konsumen, model tanggung jawab sosial perusahaan dan model kebijakan publik.

Model-model barusan juga diperinci oleh Suharto (2009), yang menyatakan bahwa ada beberapa peran pekerja sosial industri, yakni:

1. **Konselor**

Pada bagian ini seorang pekerja sosial melakukan asesmen dan konseling baik terhadap individu, keluarga atau kelompok dimana individu dan kelompok ini berada pada *setting* industri, yakni para karyawan perusahaan, ataupun kelompok mitra binaan dari program CSR Perusahaan.

2. **Konfrontatif Konstruktif**

Peranan ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan membantu individu yang mengalami ketidaksesuaian seperti kecanduan dengan melakukan asesmen dan melakukan pembuatan rencana perbaikan penyembuhan terhadap karyawan yang mengalami ketidaksesuaian tersebut ataupun kondisi yang tidak sesuai yang ditemui pada kelompok mitra binaan perusahaan.

3. Broker

Peranan ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan membantu menghubungkan karyawan atau penerima manfaat program CSR Perusahaan yang sedang dibantunya pada sumber-sumber yang dapat dijangkau baik yang ada dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan.

4. Pembela

Pekerja sosial membantu karyawan atau penerima manfaat program CSR Perusahaan untuk memperoleh pelayanan dan juga sumber yang tidak bisa diperoleh oleh diri mereka sendiri.

5. Mediator

Menjembatani konflik yang muncul di perusahaan atau pada program-program CSR perusahaan di masyarakat yang dilakukan baik oleh individu atau sebuah sistem dengan memberikan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan atau netral.

6. Pendidik atau Pelatih

Peranan ini memposisikan pekerja sosial sebagai seseorang yang dapat mengorganisir proses penyebaran informasi atau memberikan informasi dan penjelasan mengenai sesuatu dalam sebuah bisnis perusahaan.

7. Fasilitator atau Pendamping

Peranan ini memposisikan pekerjaan sosial sebagai seseorang yang mendampingi sebuah program CSR Perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan paparan penjelasan mengenai peran-peran pekerja sosial industri di atas, dapat diketahui bahwa peran pekerja sosial industri bukan hanya meliputi kesejahteraan, hak-hak karyawan perusahaan, pengembangan dan pelatihan pihak yang memiliki kepentingan di perusahaan, melainkan seluruh aspek yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan, dan salah satunya adalah para mitra-mitra perusahaan seperti masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perusahaan.

2.2.4.3 Strategi Pekerjaan Sosial Industri

Dalam menjalankan tugasnya ini juga, para pekerja sosial industri memiliki strategi-strategi demi mencapai tujuan sebuah perusahaan. Menurut Du Bois dan Miley dalam Suharto (2009), setidaknya ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para pekerja sosial industri dalam pelaksanaan tugasnya, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang atau kelompok yang menghadapi masalah.
2. Meningkatkan kapasitas dari target dengan menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan untuk memperoleh sumber, pelayanan atau kesempatan.
3. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga terkait sehingga memberikan pelayanan yang efektif, berkualitas dan mengedepankan aspek kemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu membuat sebuah situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan kondisi ekonomi dan keadilan.

Berdasarkan strategi yang dilakukan oleh para pekerja sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam *setting* industri para pekerja sosial memiliki *baseline* atau dasar dalam melakukan sesuatu baik itu melakukan upaya pemecahan masalah yang ada di dalam perusahaan ataupun yang berada di luar perusahaan seperti para mitra perusahaan dan para penerima manfaat dari program yang dilakukan oleh perusahaan.

2.2.5 Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

2.2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan oleh Soerjono Soekanto (2012) sebagai sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memelihara dirinya dengan taraf kehidupan kelompok dan memiliki ketidakmampuan dalam memanfaatkan tenaga mental maupun fisik kelompoknya tersebut.

Membicarakan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dengan ketidaksamaan kesempatan, hal ini juga seperti yang dikemukakan oleh Friedman dalam Suharto (2009) dimana Friedman mendefinisikan kemiskinan sebagai sebuah kondisi dimana di dalamnya terdapat ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis-basis kekuatan sosial yang meliputi: (a) Modal produktif seperti asset tanah, perumahan, alat produksi, (b) Sumber keuangan seperti pekerjaan dan kreditur, (c) Organisasi sosial dan politik untuk mencapai kepentingan bersama, (d) Jejaring sosial untuk memperoleh pekerjaan, jasa dan barang, (e) Pengetahuan dan keterampilan, serta (f) Informasi yang dapat digunakan untuk kemandirian kehidupan.

Kemiskinan seperti yang disampaikan pada definisi di atas erat kaitannya dengan peranan seorang pekerja sosial dalam upaya menjawab penanggulangan kemiskinan yang ada. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Tesoriorio (2008) yang menyampaikan mengenai peranan pekerjaan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dimana seorang pekerja sosial berperan dalam upaya untuk memberikan keterampilan untuk memfasilitasi, keterampilan untuk mendidikan dan juga sebagai representasi dalam upaya untuk memperoleh berbagai sumber daya dan jaringan kerja yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2.2.5.2 Indikator Kemiskinan

Berkaitan dengan kemiskinan ada beberapa pendekatan dan ciri kemiskinan yang di mana didalanya ada suatu ukuran dan tingkatan kemiskinan. Indikator dan ciri tersebut di dalamnya termasuk ada aspek ekonomi, material, sosial, kultural, institusional, dan struktural yang ada. Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2011) dalam Edi Suharto (2011) menjelaskan indikator kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kekurangan Materi

Indikator kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi kelangkaan materi atau barang yang diperlukan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan ini dapat diartikan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh barang yang bersifat kebutuhan dasar.

2. Rendahnya Penghasilan dan Kekayaan yang Memadai

Indikator ini dikaitkan dengan standar atau ukuran garis kemiskinan yang ditetapkan oleh suatu negara ke negara lainnya, bahkan satu komunitas dengan komunitas lainnya dalam suatu negara.

3. Kesulitan dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial

Indikator ini membicarakan tentang keterkucilan sosial (*Social exslucion*), ketergantungan, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan ini dapat diartikan pula sebagai kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas suatu lembaga pelayanan sosial seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Selain ketiga indikator tadi, Edi Suharto (2006) dalam bukunya juga menjelaskan hal lainnya yang dapat mencirikan atau menandai kemiskinan, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Sandang, pangan, dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena kondisi cacat fisik ataupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal;
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya;
8. Ketiadaan jaminan masa depan, dan;
9. Keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun masyarakat.

2.2.5.3 Fokus Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Fokus pekerjaan sosial dengan kemiskinan dapat dikategorikan berdasarkan kategori kemiskinan yang ada, hal ini seperti yang disampaikan oleh Suharto (2009) bahwa setidaknya ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi fokus dari pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang Paling Miskin atau Fakir Miskin (*Destitute*)

Kategori miskin yang menjadi fokus pekerja sosial yang pertama ini adalah mereka yang secara absolut memiliki sumber pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali serta tidak dapat mengakses terhadap berbagai pelayanan sosial.

2. Kelompok Miskin (*Poor*)

Kategori miski yang kedua ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar dan setidaknya masih dapat mengakses sumber finansial seperti pendidikan dasar.

3. Kelompok Rentan (*Vulnerable*)

Kategori yang ketiga ini dapat diumpamakan sebagai bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok miskin dan paling miskin, namun kategori ini sering disebut sebagai agak miskin (*Near poor*) yang membuat mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Sering berpindah dari status kelompok rentan menjadi kelompok miskin hingga menjadi sangat miskin. Hal ini terjadi karena krisis ekonomi dan tidak mendapatkan pertolongan sosial.

Berdasarkan ketiga kategori kemiskinan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan program pemberdayaan kelompok usaha tani yang dilakukan dalam penelitian ini adalah upaya untuk menanggulangi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan (*Vulnerable*) agar dapat terlepas dari kondisi tersebut atau setidaknya tindakan pencegahan agar kelompok tersebut tidak naik ke tingkatan miskin hingga sangat miskin.

2.2.5.4 Peran Pekerja Sosial dengan Kemiskinan

Peran-peran pekerja sosial yang berpartisipasi dalam *setting* kemiskinan dapat dilihat pada beberapa peran yang dikemukakan oleh Schwartz dalam Suharto (2009) sebagai berikut:

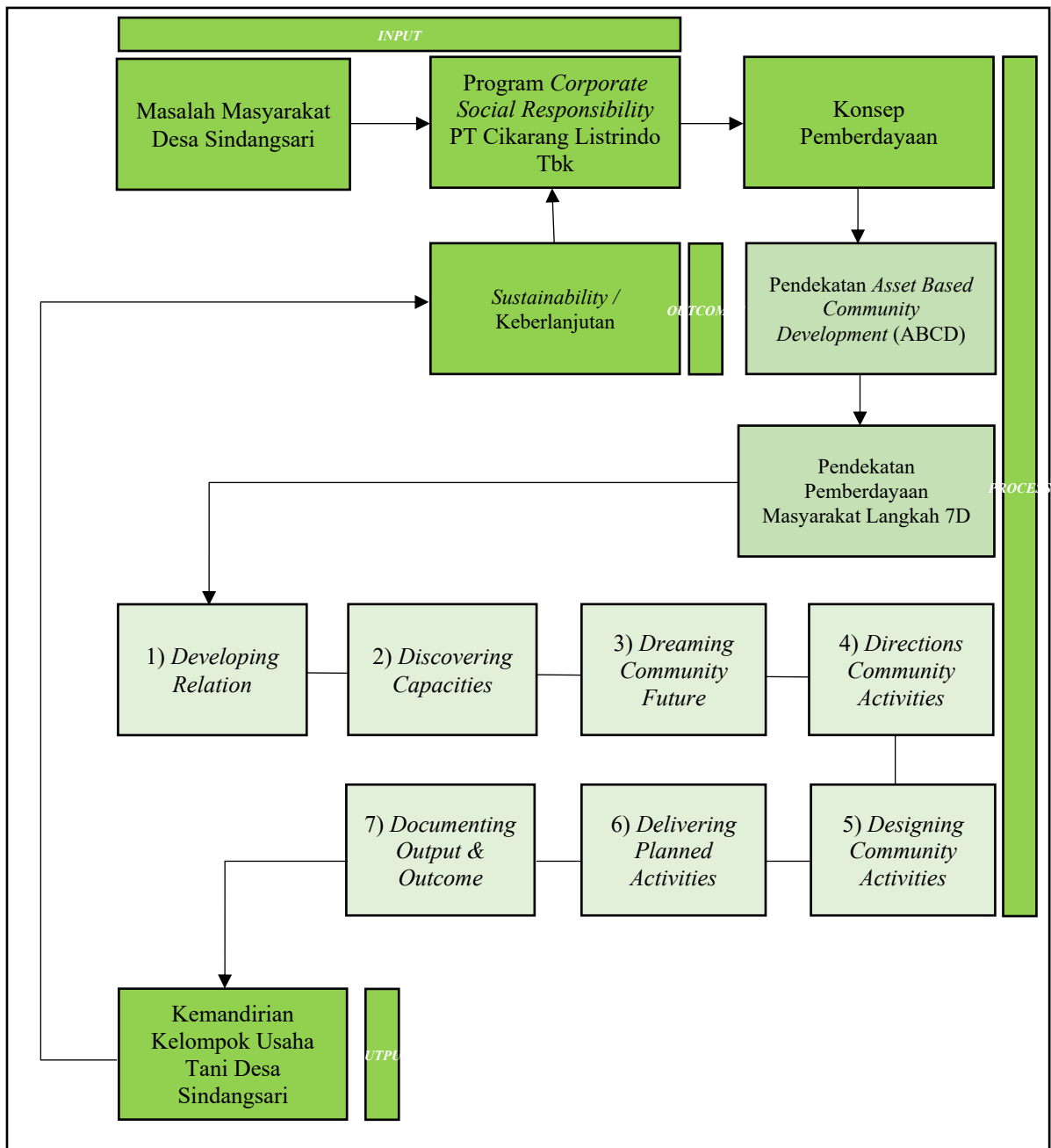
1. Melakukan pencarian persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek kebutuhan sosial yang dibutuhkan masyarakat.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang di sekitar mereka terhadap dirinya (*Significant others*).
3. Memberikan kontribusi data mengenai ide, fakta, nilai dan konsep yang tidak diketahui dan dimiliki oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi.
4. Membagi visi dan harapan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk investasi bagi interaksi antara orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

5. Mendefinisikan syarat-syarat dan bantuan-bantuan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk.

Peran-peran yang sudah dijelaskan tersebut merupakan bentuk peranan-peranan yang juga erat kaitannya dalam proses pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan kontribusi ide, membentuk tujuan dan visi masyarakat dan memberikan syarat serta bantuan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lewat kelompok usaha tani yang dilakukan lewat implementasi program *Corporate Social Responsibility* PT Cikarang Listrindo Tbk adalah salah satu bentuk penggunaan baik prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan *Corporate Social Responsibility*. Kolaborasi, upaya pemecahan masalah lewat potensi dan sumber daya lokal, upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guna mencapai kemandirian adalah karakteristik yang nampak dalam proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimana objek pemberdayaannya disini adalah kelompok usaha tani, dengan menjawab permasalahan yang muncul di lapangan tentang kurang mampunya masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada maka dilakukanlah usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan lewat program *Corporate Social Responsibility* yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan, yakni PT Cikarang Listrindo yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membangun kemandirian masyarakat Desa Sindangsari Sumedang.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
 Sumber: Olah Data Penelitian 2023